

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki aturan, kebijakan, dan undang-undang lengkap yang terkait dengan pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Salah satu penyebabnya adalah kelemahan dalam pelaksanaan oleh beberapa oknum. Beberapa pihak yang berkepentingan kerap kali tidak memprioritaskan pendidikan yang berkualitas dan lebih berfokus pada kepentingan sendiri. Hak untuk memperoleh pendidikan adalah hak setiap warga negara dan juga merupakan Hak Asasi Manusia untuk mengasah keterampilan dan pengetahuannya melalui proses pembelajaran. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang menyatakan bahwa “*setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan*”. Dalam mendukung hal tersebut, pemerintah berkewajiban memberikan dana atau menyelenggarakan pendidikan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Pejuang kemerdekaan yang menjadi bagian dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah memahami bahwa masalah pendidikan di Indonesia memerlukan perhatian serius. Beberapa kendala yang dihadapi oleh sebagian masyarakat dalam akses dan kualitas pendidikan meliputi: pertama, terdapat keterbatasan dalam tersedianya sarana dan prasarana

pendidikan yang memadai, seperti sekolah dan fasilitas belajar. Ini membuat sulitnya menampung seluruh peserta didik, terutama di daerah terpencil. Kedua, biaya pendidikan dianggap mahal dan berat bagi banyak orang tua peserta didik. Hal ini bisa menjadi hambatan serius dalam akses pendidikan, terutama untuk keluarga yang kurang mampu. Ketiga, ketidaksetaraan akses pendidikan, dimana kebijakan pendidikan tidak seluruhnya memastikan keterbukaan kesempatan yang serupa bagi seluruh kelompok masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang transparan, merata, dan setara. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta ketidaksetaraan akses pada tingkat regional. Oleh karena itu, masalah-masalah ini perlu diatasi untuk meningkatkan akses, kualitas, dan kesetaraan dalam pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam membangun fondasi negara. Langkah tersebut sejalan dengan visi negara untuk menciptakan masyarakat yang berpendidikan dan berbudaya, serta memastikan bahwa pendidikan menjadi hak bagi setiap warga negara (Affandi, 2017).

Agar menyentuh seluruh masyarakat, Pemerintah Indonesia memberikan kebijakan tertentu, salah satunya melalui otonomi khusus. Sejak masuknya Papua kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pada tahun 2001 Pemerintah Pusat memberikan Otonomi Khusus kepada Papua. Otonomi khusus ini merupakan jalan tengah yang ditempuh sebagai alternatif terhadap aspirasi kemerdekaan yang diinginkan oleh sebagian rakyat Papua pada masa itu. Kebijakan otonomi khusus dirancang untuk menahan ancaman serius terhadap disintegrasi atau pemisahan diri yang dihadapi oleh rakyat Papua.

Meskipun demikian, perlu ddiingat bahwa kebijakan ini dirumuskan dalam konteks situasi dan kondisi sosial politik yang sangat kompleks di seluruh wilayah Papua. Oleh karena itu, proses pengembangan kebijakan otonomi khusus di Papua merupakan tantangan yang sangat berat

Tujuan utama dari kehadiran Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang. Salah satu bukti adanya upaya ini adalah amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Otonomi Khusus pada Pasal 56. Pasal ini mengamanatkan bahwa otoritas pemerintah di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan untuk memberikan dukungan atau bantuan finansial teruntuk penyelenggara pendidikan ditujukan kepada individu yang memerlukan pembiayaan pendidikan. Dengan demikian, Pasal 56 Undang-Undang Otonomi Khusus tersebut memiliki makna penting dalam pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Papua, karena memungkinkan pemerintah setempat untuk memberikan dukungan keungan kepada warga yang ingin mengejar pendidikan, terutama kepada mereka yang memiliki keterbatasan finansial. Hal ini merupakan langkah kongkret untuk memajukan pendidikan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua, sekaligus mendorong perkembangan SDM di wilayah Papua.

Setelah mendapatkan hak untuk mengatur dan menjalankan kepentingannya sendiri, kerap kali permasalahan di Papua muncul seperti separatisme, HAM, dan desentralisasi pemerintahan bersama dengan beberapa

isu lainnya mengakibatkan jalannya pembangunan sedikit terlamabat (Pepare, I F. Sudiby, P& Widodo, 2021). Pembangunan dalam hal ini menyangkut pada pembangunan yang berkaitan dengan aspek material dan juga pembangunan yang berkaitan dengan aspek non-material seperti pengembangan Orang Asli Papua (OAP) baik secara lokal maupun nasional. Jika dilihat kembali sejarahnya, di masa pemerintahan Orde Lama kemajuan di Papua terhambat dikarenakan terpusatnya kebijakan pembangunan. Artinya pembangunan pada saat itu hanya berfokus pada pusat Indonesia. Hal Ini menghambat pembangunan yang terencana dan terarah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memerlukan perubahan budaya sosial sebagai pendorongnya.<sup>1</sup> Perkembangan pembangunan di Papua, terutama dalam hal sumber daya manusia OAP, dianggap belum sebanding dengan perkembangan sdm pada suku lain di Indonesia.

Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam pengembangan potensi individu yang dipersiapkan untuk berperan aktif dan produktif dalam kehidupan bermasyarakat. Kabupaten Merauke yang menjadi Ibu Kota dari Daerah Otonomi Baru yaitu Provinsi Papua Selatan, yang juga telah mendapatkan aliran dana otonomi khusus, nyatanya belum menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan secara signifikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Belantara Papua, terdapat fenomena menarik di Kabupaten Merauke terkait pendidikan. Meskipun ada

---

<sup>1</sup> Solikatun, S., & Masruroh, Y. (2014). Kemiskinan dalam pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1).

alokasi dana otonomi khusus yang diberikan dengan tujuan untuk mempercepat perkembangan sumber daya manusia Papua, tampaknya pencapaian tujuan tersebut belum sepenuhnya berhasil menyejahterakan Orang Asli Papua.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke secara keseluruhan tingkat pendidikan di Kabupaten Merauke pada tahun 2022 masih perlu ditingkatkan, disebabkan sebagian besar penduduknya masih memiliki latar belakang pendidikan sampai tingkat SMP atau yang setara. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Merauke yang tidak memiliki ijazah mencapai 10,59 persen, sementara yang lulus SD atau setingkatnya adalah sekitar 17,60 persen, dan yang menyelesaikan SMP sekitar 22,04 persen. Dengan demikian, sebanyak 50,23 persen penduduk Kabupaten Merauke usia 15 tahun ke atas hanya memiliki pendidikan sampai tingkat SMP atau lebih rendah (Badan Pusat Statistika Kabupaten Merauke, 2023).

Pada program wajib belajar 9 tahun yang dijadwalkan oleh pemerintah telah memberikan hasil yang memuaskan. Hal ini berdasarkan persentase kelompok berumur diatas 15 tahun yang telah menyelesaikan sekolah setara dengan SMP atau yang lebih tinggi, sebanyak 71,81 persen. Angka ini terdiri dari yang menamatkan SMP atau setara sekitar 22,04 persen, yang menyelesaikan SMA/SMK atau setara sekitar 37,59 persen, dan yang mendapatkan diploma (D1/D2/D3) serta gelar sarjana kea ta (profesi/D4/S1/S2/S3) masing-masing sebesar 1,70 persen dan 10,49 persen.

Sebagai Provinsi baru yang hadir dengan membahawa harapan untuk perubahan, penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap masalah

pendidikan di empat kabupaten yang ada di Provinsi Papua Selatan (PPS). Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Drs. Aloysius Jopeng, M.Pd mengatakan bahwa permasalahan yang sedang terjadi di Papua Selatan salah satunya adalah tingginya angka putus sekolah. Untuk permasalahan anak putus sekolah sangat tinggi pada empat Kabupaten ini. Kabupaten Merauke terdapat 5921 anak pada jenjang Paud, hanya 3312 yang tercatat mencapai jenjang SD dan hal yang sama terjadi pada jenjang SD menuju SMP. Pada jenjang berikutnya yaitu SMP ke SMA/SMK cukup banyak siswa yang tidak menempuh pendidikan dikarenakan faktor ekonomi. Untuk Kabupaten Mappi, siswa PAUD terdapat 820 anak namun belum terdata jumlah anak yang melanjutkan ke tingkat SD. Pada tingkat SMP dan SMA, dan seterusnya terdapat 3000 anak yang tidak melanjutkan pendidikan. Hanya 462 anak yang dapat diakomodasi di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Yang berarti sekitar 2.538 anak yang tidak terakomodasi. Kabupaten Asmat menjadi Kabupaten kedua terbanyak yang masyarakatnya tidak melanjutkan sekolah, dengan total 13.040 orang. Mereka menjadi masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan secara baik. Kemudian, Kabupaten Boven Digoel terdapat 29.230 masyarakat yang putus sekolah sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan pendidikan baik formal maupun non formal. Penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke maupun Pemerintah Provinsi menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya belajar, baik bagi anak-anak asli Papua ataupun orang tua mereka. Dorongan motivasi dan bantuan pembiayaan dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut.

Orang Asli Papua di Kabupaten Merauke sendiri sering menghadapi keterbatasan dalam akses pendidikan tinggi. Jarak antara wilayah mereka dengan pusat-pusat pendidikan tinggi seringkali jauh dan sulit dijangkau. Hal ini menyebabkan banyak diantara mereka yang tidak dapat melanjutkan pendidikan setinggi mungkin, sehingga kesempatan mereka untuk mengembangkan diri terbatas. Selain itu, banyak keluarga Orang Asli Papua yang hidup dibawah garis kemiskinan, sehingga tidak mampu membiayai pendidikan tinggi untuk anak-anak mereka. Biaya kuliah, akomodasi, dan kebutuhan sehari-hari menjadi hambatan utama dalam mendorong generasi muda Orang Asli Papua untuk mengejar pendidikan tinggi.

Kabupaten Merauke sendiri memiliki potensi dan kekayaan budaya yang perlu dijaga. Khususnya bagi Orang Asli Papua, kekayaan budaya yang unik dan berharga, termasuk bahasa, tradisi dan pengetahuan lokal yang dimiliki perlu dijaga. Namun, ada kekhawatiran bahwa budaya ini dapat terancam punah jika generasi muda tidak mendapatkan pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya ini melalui pendidikan tinggi. Selain itu, Kabupaten Merauke memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam sektor pertanian dan sumber daya alam. Namun, untuk mengoptimalkan potensi ini, diperlukan SDM yang terlatih dan teredukasi dengan baik. Program pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke Bagian Kesejahteraan menjadi kunci untuk menghasilkan kader-kader unggul yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah ini.

Dengan memperhatikan latar belakang diatas, perlu adanya strategi pengembangan SDM Orang Asli Papua melalui beasiswa pendidikan tinggi di Kabupaten Merauke. Beasiswa ini dapat membantu menciptakan kesempatan yang lebih adil dan merata dalam mengakses pendidikan tinggi, mengurangi ketidaksetaraan, dan memungkinkan generasi muda Orang Asli Papua untuk mengembangkan potensi mereka. Selain itu, strategi ini dapat membantu melestarikan budaya dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Merauke.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dengan mengacu pada informasi sebelumnya, rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Strategi Pemerintah dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua (OAP) melalui Bidang Pendidikan di Kabupaten Merauke?
2. Apa faktor penghambat Pemerintah dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua (OAP) melalui Bidang Pendidikan di Kabupaten Merauke?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Strategi Pemerintah dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua (OAP) melalui Bidang Pendidikan di Kabupaten Merauke.

Untuk Mengetahui faktor penghambat dalam Pengembangan Sumber Daya Manusi Orng Asli Papua (OAP) melalui Bidang Pendidikan di Kabupaten Merauke.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis hasil yang diperoleh diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu, pemahaman dan bisa dijadikan sebagai refrensi penelitian selanjutnya tentang Strategi Pemerintah dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Orng Asli Papua (OAP) melalui Bidang Pendidikan di Kabupaten Merauke.

##### **2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat secara praktis dari hasil penelitian ini diharapkan bagi akademis bisa menjadi refrensi mata kuliah mengenai proses strategi pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan dikhususkan bagi pemerintah, hasil penelitian ini bisa memberi manfaat sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan teori yang ada pada penelitian ini. Sehingga strategi pengembangan bisa berjalan dengan efektif dan efisien melalui hubungan kerja sama yang lebih baik.

#### **1.5. Definisi Konseptual**

##### **1. Strategi Pemerintah**

Strategi Pemerintah merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pengembangannya

konsep strategi harus memiliki perkembangan dan setiap orang memiliki pendapat sendiri. Strategi ialah perantara dalam mencapai tujuan berkepanjangan yang digunakan secara bersama-sama (David, 2011). Pengertian strategi lainnya merupakan pedoman utama yang komprehensif, yang merincikan sebuah organisasi nantinya meraih target yang telah ditentukan dengan berlandaskan dari misi yang telah ditetapkan (Rangkuti, 2013). Strategi pemerintah adalah sarana dalam meraih sasaran atau keunggulan bersaing sembari mempertimbangkan kondisi dari luar dan dalam dari sebuah lembaga. Langkah yang diambil oleh sebuah lembaga tentunya harus menghasilkan efek positif bagi lembaga itu sendiri ataupun afiliasinya (Pearce II, John A. & Robinson, Ricard B. Jr, 2008). Dari pengertian beberapa ahli diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah akan membuat strategi untuk dijadikan alat dalam mencapai tujuan. Strategi tersebut dapat berupa suatu kebijakan atau tindakan sesuai dengan yang telah direncanakan.

## 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah suatu proses sistematis yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan kapasitas individu dalam sebuah organisasi atau masyarakat. Para peneliti memiliki pengertian sendiri mengenai Pengembangan Sumber Daya Manusia, seperti pandangan diberikan (Notoatmojo, 2003) mengenai pengembangan sumber daya manusia. Pendapat yang diberikannya ialah PSDM usaha untuk meningkatkan

kualitas atau kapabilitas individu melalui langkah persiapan, pelatihan, dan manajemen karyawan agar memperoleh hasil yang maksimal.

Pemaparan dari (Werner, J. M., & DeSimone, R. L, 2011) Pengembangan Sumber Daya Manusia merujuk pada serangkaian aktivitas terencana yang diselenggarakan oleh komunitas untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya dalam mempelajari keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan baik saat ini maupun di masa mendatang. Secara umum, psdm bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengalaman, keterampilan, kinerja, dan kesenangan tenaga kerja.

PSDM merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dasar individu untuk menunjang suatu lembaga memperoleh sasarannya (Bangun, 2012). Berdasarkan pandangan (Priansa, 2014), psdm merupakan persiapan seorang tenaga kerja yang mengemban tugas besar dalam sebuah perusahaan. Hal ini seringkali melibatkan pengembangan kecerdasan atau mental yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas agar lebih optimal.

Dari perspektif pengamatan pakar yang telah diuraikan, bisa diambil kesimpulan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kompetensi karyawan agar dapat menanggapi tuntutan perubahan dan evolusi dalam lingkungan organisasi.

### 3. Otonomi Khusus dan Orang Asli Papua (OAP)

Provinsi Papua ditetapkan menjadi daerah otonomi khusus sejak berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa Provinsi Papua sebelumnya dikenal

sebagai Provinsi Irian Jaya. Provinsi ini menjadi bagian dari NKRI dengan beragam kelompok etnik yang memiliki bahasa daerah dengan jumlah sebanyak 250. Kepala Daerah Provinsi Papua yang disebut Gubernur memimpin secara langsung pemerintahan. Struktur administrative Provinsi Papua meliputi sekretariat provinsi, bergabagai dinas provinsi, dan lembaga teknis lainnya, mendukung gubernur dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keperluan wilayah.

Orang Asli Papua (OAP) merupakan individu yang asalnya dari kelompok etnis Melanesia yang merupakan bagian dari suku asli provinsi tersebut. Istilah OAP ada sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Terdapat dua ciri khas yang membedakan fisik Orang Asli Papua dengan suku lainnya, yaitu OAP memiliki warna kulit yang hitam atau gelap dan juga bentuk rambut ikal atau keriting. Dari definisi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa Orang Asli Papua (OAP) adalah masyarakat asli yang berada di Papua dengan memiliki karakteristik tersendiri sebagai pembeda dengan masyarakat lainnya

#### **1.6. Definisi Operasional**

Definisi Operasional merupakan hasil dari penjabaran rumusan masalah penelitian, yang melibatkan pengidentifikasian beberapa indikator yang akan dijadikan acuan dan dianalisis dalam pembahasan hasil Definisi Operasional penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1.6.1. Strategi Pemerintah dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua (OAP) melalui Bidang Pendidikan di Kabupaten Merauke

- a. Bantuan Pemerintah melalui Beasiswa dan Bantuan Pendidikan
- b. Monitoring dan Evaluasi

1.6.2. Faktor Penghambat dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua (OAP) melalui Bidang Pendidikan di Kabupaten Merauke

- a. Faktor Faktor Internal
- b. Faktor Eksternal

## **1.7. Metode Penelitian**

1.7.1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebuah jenis kualitatif dengan metode penelitian penjabaran deskriptif. Menurut Creswell (Creswell, 2015) penelitian deskriptif kualitatif disini bertujuan untuk mendapatkan informasi di lapangan. Untuk itu, dalam penelitian ini akan berisikan naskah berupa wawancara, video/foto, catatan, dan berbagai dokumen resmi lainnya. Sebelumnya Denzin dan juga Lincon (1994) memberikan pendapat tentang metode penelitian yang menggunakan kualitatif merupakan penelitian dengan latar belakang secara alamiah. Artinya penelitian ini akan menafsirkan sebuah masalah fenomenal yang diangkat dengan cara melibatkan beberapa metode yang sebelumnya.

Dalam penelitian ini akan menampilkan deskripsi tentang sebuah strategi yang dilakukan pemerintah khususnya dalam pengembangan Sumber Daya Manusia Orang Papua di bidang pendidikan melalui bantuan beasiswa ataupun bantuan pendidikan. Penelitian ini direalisasikan dengan cara melakukan pengamatan dan mencatat segala informasi terkait data kemudian dilanjutkan dengan memberikan deskripsi kegiatan untuk laporan hasil wawancara dan menjabarkan data pendukung lainnya. Data yang diperoleh bisa berupa sebuah data tabel, data gambar, dan didukung oleh penelitian terdahulu yang didapatkan melalui buku serta jurnal. Setelah itu semua data yang telah diperoleh diolah kembali untuk memberi jawaban atas rumusan masalah penelitian yang dibuat.

#### 1.7.2. Sumber Penelitian

Sumber data primer maupun sekunder akan diuraikan untuk menggambarkan keluasan dan kedalaman penelitian yang disajikan berikut ini.

##### 1. Data Primer

Data primer menjadi sebuah data dalam penelitian yang didapatkan langsung oleh peneliti melalui penelitian secara langsung dari sumber asli. Data ini di dapatkan melalui sebuah wawancara ataupun turun lapang bersama beberapa pelaku atau subjek penelitian. Pada data primer ini difokuskan pada Sekretariat

Daerah khususnya Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Merauke.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti bukan dari subjek penelitian atau sumber utama. Data ini bersumber dari sumber-sumber yang dapat diandalkan seperti, dokumen hukum (Undang-Undang), jurnal, artikel, skripsi, website, dan arsip-arsip yang diperoleh dari pemerintah daerah.

### 1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data. Tiga teknik dilakukan diantaranya ada Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi untuk memperkuat data. Ketiga teknik tersebut dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pertama dimana teknik ini dipakai untuk mengumpulkan sumber data primer. Teknik yang dilaksanakan dengan cara turun lapang secara langsung guna menganalisa kegiatan implementasi dilapangan melalui pengamatan objek yang diteliti. Penelitian secara langsung dilakukan di Kantor Bupati Merauke yang melibatkan Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk mendapatkan data.

## 2. Wawancara

Kedua, teknik wawancara untuk mendapatkan data primer melalui Tanya jawab bersama Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Staff Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Mahasiswa Papua terkait dengan bantuan pendidikan yang didapatkan. Wawancara dilakukan dengan mencatat hasil tanya jawab dan merekam proses tanya jawab agar tidak ada data yang tertinggal selama proses wawancara berlangsung.

## 3. Dokumentasi

Setelah kedua teknik diatas telah dilaksanakan yaitu observasi dan wawancara, data bisa diperkuat melalui dokumentasi. Teknik dokumentasi termasuk dalam upaya mendapatkan data sekunder sebagai pendukung data primer yang telah diperoleh. Dokumentasi yang diperoleh berupa dokumentasi kegiatan Strategi Pemerintah dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua melalui bidang pendidikan yang dilakukan oleh staff bidang Kesejahteraan Rakyat dan Mahasiswa Orang Asli Papua yang menerima bantuan beasiswa ataupun bantuan pendidikan. Dokumentasi merupakan salah satu data untuk memperkuat bukti proses pelaksanaan strategi telah dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab strategi telah dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab.

#### 1.7.4. Analisis Data

Seluruh data yang telah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data kemudian akan dianalisa kembali untuk dijabarkan dalam hasil penelitian. Beberapa langkah yang dilakukan diantaranya reduksi data, kemudian data yang telah dipilah akan ditampilkan atau display, dan kemudian akan ditarik kesimpulan oleh peneliti. Analisa data akan dijabarkan sebagai berikut:

##### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses mengupas sumber data primer dan data sekunder. Agar memahami strategi pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia orang asli Papua melalui bidang pendidikan di Kabupaten Merauke, peneliti akan mengumpulkan data melalui obeservasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian disortir seperlunya sebelum ditampilkan dalam hasil penelitian.

##### 2. Display Data

Data yang berhasil dipilah akan dianalisa secara kualitatif deskriptif disertai data yang di display untuk memperkuat bukti dalam hasil pembahasan. Data yang ditampilkan akan dijabarkan menggunakan teks naratif untuk memberi gambaran terkait dengan strategi pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia orang asli Papua melalui bidang pendidikan di Kabupaten Merauke. Data yang ditampilkan berupa data persebaran Mahasiswa Papua

yang menerima bantuan beasiswa dan bantuan pendidikan, data pembayaran beasiswa mahasiswa Papua.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses terakhir untuk melakukan verifikasi terhadap hasil penelitian. Proses ini diuraikan dari peneliti mencocokkan data dengan pengamatan yang telah dilakukan dari awal hingga akhir. Setelah penarikan kesimpulan dilakukan, akan dilanjutkan dengan pemberian saran sebagai masukan untuk pemerintah selaku pelaksana strategi guna memperbaiki kinerja yang kurang dalam proses kegiatan



